

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA

SKRIPSI

**Analisis Kinerja Keuangan Daerah  
Kota Palembang  
Pada Era Otonomi Daerah**



Diajukan Oleh :

**TEDDY SETYA YUDHA**

**01023120008**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat**

**Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

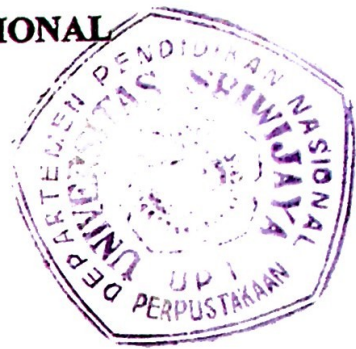
**2007**

0 7

1/1

658.1507  
Yud  
a  
2007

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**



**SKRIPSI**

16102

16464

**Analisis Kinerja Keuangan Daerah  
Kota Palembang  
Pada Era Otonomi Daerah**



**Diajukan Oleh :**

**TEDDY SETYA YUDHA**

**01023120008**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat**

**Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**2007**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : TEDDY SETYA YUDHA  
NIM : 01023120008  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN  
MATA KULIAH : EKONOMI PEMBANGUNAN REGIONAL  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH  
KOTA PALEMBANG PADA ERA OTONOMI  
DAERAH

**PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI**

TANGGAL PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Tanggal 12 November 2007

Ketua :



DR. Azwardi, M.Si

Tanggal 12 November 2007 Anggota :



Dra. Hj. Sa'adah Yuliana, M.Si

**TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF**

N A M A : TEDDY SETYA YUDHA  
NIM : 01023120008  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN  
MATA KULIAH : EKONOMI KEUANGAN REGIONAL  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA  
PALEMBANG PADA ERA OTONOMI DAERAH

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 22 November 2007 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Inderalaya, 3 Desember 2007

Ketua, 

Dr. Azwardi, M.Si  
NIP. 132050494

Anggota,



Dra. Hj. Saadah Yuliana, M.Si  
NIP. 131885904

Anggota,



Dr. Taufiq Marwa, M.Si  
NIP. 132050493

Anggota,



Drs. M. Umar Nuh  
NIP. 130353380

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Taufiq Marwa, M.Si  
NIP. 132050493

Motto:

>>> Hidup Adalah Rintangan yang Harus Dijalani

Perjuangan yang Harus Dimenangkan

Rahasia yang Harus Digali

Dan, Anugerah yang Harus Disyukuri<<<

Kupersembahkan Kepada :

- Ayah dan Ibu Tercinta
- Mbak dan Adikku Tersayang (Mbak Ika dan Adek Arie)
- Hamba Allah yang kelak Mendampingi
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku Tercinta

## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 dan 34 Tahun 2004 sebagai wujud dari pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan agar tiap-tiap daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga kemandirian penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan di daerah, dengan pemberlakuan otonomi daerah maka pemerintah daerah juga dituntut untuk menggali dan memanfaatkan secara optimal potensi-potensi sumber daya yang ada sebagai sumber keuangan daerah.

Kemampuan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri khususnya dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan sejauh mana keberhasilan pengelolaan potensi daerah yang ada sebagai input Pendapatan Daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi Derajat Desentralisasi Fiskal karena Derajat Desentralisasi Fiskal diperoleh dari rasio PAD dengan Total Penerimaan Daerah (TPD), selain itu secara tidak langsung maka diperlukan analisa mengenai Efisiensi dan Efektivitas dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri sebagai ukuran keberhasilan dari Kinerja Keuangan Daerah. Hal inilah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Palembang Pada Era Otonomi Daerah”. Penulis mencoba menelaah tingkat kemampuan atau kemandirian keuangan daerah Kota Palembang melalui Derajat Desentralisasi Fiskal dan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan keuangan daerah.

Penulis sadar bahwa hasil dari penelitian ini masih belum sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun dan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca, Amin.

Inderalaya, 2 November 2007

Teddy Setya Yudha

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T atas segala nikmat, cinta, dan lindungannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Palembang Pada Era Otonomi Daerah” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada Kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan material dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, sebagai rasa hormat, penghargaan, dan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas penulis ucapkan kepada :

1. Allah S.W.T atas rahmat, cinta, dan karuniaNya serta semua nikmat yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada penulis.
2. Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih tak terhingga atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, doa, dan kesabaran selama ini yang tidak akan pernah bisa terbalaskan. Semakin Ananda sadar betapa sangat besarnya cinta ayah dan ibu, ananda mohon maaf bila pernah menyakiti kalian.
3. Prof. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Syamsurijal, Ak, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Taufiq Marwa, M.si Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
6. Dr. Azwardi, M.si , Pembimbing I skripsi, sebagai panutanku yang sangat berwibawa.
7. Dra. Hj. Saadah Yuliana, M.si, pembimbing II skripsi, atas kesabaran dan kebesaran hati beliau.
8. Semua Bapak/ibu dosen yang dengan sabar telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Yuk Ita yang dahulu dengan sabarnya mengurus penulis dan mahasiswa di jurusan Ekonomi Pembangunan.
10. Yuk semi yang telah memberikan bantuan yang tak ternilai di penghujung jalan.
11. Kak Adi yang sekarang lagi sibuk-sibuknya dibidang yang baru.
12. Mbak Ika, Mas Arief, dan Farah keponakanku yang lucu dan pintar, mas makasih yah laptopnya, mbak Ika jangan judes-judes sama mas Arief dan Farah.



13. *My best Brother on the World* Arie, kuliah yang fokus jangan main-main terus, dan yang terpenting jangan ceroboh yah dek. Pokoknya adek yang terbaik. Cepat-cepat punya pacar yah.
14. Buat Inspirasi yang paling berarti Nijakuw tak cukup taburan bintang untuk mengucapkan terima kasih atas apa yang adek berikan selama ini, tetap sayangi aku seperti ini, cepat tamat ya, ingat janji adek umur 24, Amin.
15. Buat BG 5969 EE (enyek-enyek) yang selalu bersama berjuang dengan aku dan yang pasti tidak pernah mengeluh, pertempuran kita tidak selesai hanya sampai disini.
16. Buat ImPPrata Music Community tempat aku tumbuh dan berkembang sampai aku bisa seperti ini. spesial buat kak Oyon tempat aku mengadu, aku yakin Impprata akan berkibar di dunia musik Indonesia keep ethnic rock!, Ncep sang manusia aransem (tetaplah berkarya), cever (gaya kamu main bass keren), Feby guru double (stylenya donk), Martin NIP guru drum terbaiku (semoga awet sama osanya martin), kak suher (terima kasih jilidannya), kak rian, salah, rahmi, rika, the Strident, Tarakiri, Avenged sevenfold (untuk musik indahnya) dan para calon-calon musisi impprata.
17. buat my band X-Calibour, kak imam *my best guitarist* (lagunya kapan jadi?), Rudi (Lai) manusia paling hebat main bass (tempo nya ted), okto manusia bersuara indah (apa kabar ito' ku?), aku sangat bangga menjadi bagian dari kalian, makasih telah memberikan aku pelajaran tentang musik , tetap cintai x-calibour.
18. Anak-anak Serumpun terutama Eka hula galaksi beat, terimakasih atas perjalanan yang kita lalui selama ini, tak ada yang bisa sebaik kamu, jangan putus ya tali persahabatan kita, Adie *my eks-homemate* cepatlah tamat katanya mau sama-sama tamat, Zuhrie si anak kucing terimakasih sudah mengajari download, Ari baim long, semoga cepat dapat pacar, Aza lanjutkan skripsinya ya, anak-anak MBMCI, David (kapan acara kita), Dedy, Fathan, Yudhi vokalis a7x, Iki, Yudis sepultura, Adie, Ambon, Dj ri2, Anastasya, Deean, Yopie, Rio kiting, Richi, Rach, Andic, Hadi, kak Alpin, kak alim, mang Yan, dan Teguh, kalian yang memberi warna selama aku kuliah.
19. Buat temen-temen di kotaku tercinta Lahat, Dheri (apek), Edho, Ef, Eponk, Wakyenk, Garenk, Dina adikku, Pie, Febri boy, om Adek, Okek, , yhoenez, Ari mek, Yho, kevan, fedri, Deni, Liau, Yik, Septi, Vera, Ria, Merry, Dina, tria, pokoknya semua sahabat-sahabat lamaku terutama alumnus Smu 1.

20. Buat anak 14 yang lucu-lucu, Dodo tetep semangat ya, Ira-Edi, dokter Iis, Ipin, adekku Nove', Dita dan ayank Efran, trus Agis.
21. Buat sahabatku selamanya Ade baung si raja curhat, g-Me sahabat yang paling pengertian, Olid Garang sudah punya pacar belum? ayo kita tamat, willy munek yang jauh di Kalimantan, Tommy betah ya di Jogja?, yang terpenting Anak-anak CFC(cicak fans club) Iax kudel, Didi pecah otak, Pandu macho, Andre enyek, Dj, Ido (aku pengen ketemu) dan chay, kalian yang bikin aku tau arti persahabatan. Tetap bikin dunia ceria oke.
22. Untuk keluarga besarku di Lahat dan di Palembang, terimakasih atas doanya selama ini, semoga almarhuma mbah diterima disisiNya, aku sayang kalian semua.
23. Terakhir buat anak Ekonomi EP 02 Herta my best thanks atas support dan dukunganya selama ini salam untuk keluarga, Rully jangan sombong ingat kita pernah sama-sama berjuang, Ari' ayo ri semangat biar cepat tamat, Mitha kejarlah skripsinya, Ista terimakasih jawabanya waktu kompre, Andi tetap cool, Belly jangan cemberut terus, Halim, Nia, dulur Azhari, Rawal, Mr. Dee, Robert, Dani, Aning, Nopri, Ajib, Habib, Roy, Dorro, Bob joe, Andrew, Sari, Dewi, Vivi, Dian, Evi, Lia, Anca, faisal hacker, dll. Buat k2 dan adek tingkat gerombolan Adam, Ncis, Tujah, Ct, Kecek, Unto sahabat di ujung penantian, Zamil, Be2k, Todes, Yoga, Agus, Joni, Vika, Adjie sumber jawaban dari segala pertanyaan, Intan, Ela dan rombongan, Inge, Agus 04, Hendra 04, kuartet Icha Ulan Osa Nija jangan sering gosipin orang, Ariesnu, Ade 04, 06 society, Dodi zacky, Hendra, Adit dummer, Selpan, Reza, Lian mgt, Febri mgt, Pey mgt, jay mgt kutipkan dua saudara di tangan mu, tamat kita!, semoga kita tetap bertemen.

Akhirnya kepada semua insan yang lupa disebutkan penulis mohon maaf dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah membalas semua budi baik kalian. Amin.

## DAFTAR ISI

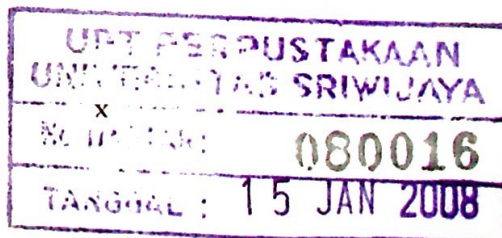
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan Komprehensif.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima kasih.....	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Grafik.....	xiv
Abstraksi.....	xv
Abstract.....	xvi

### BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Sumber-sumber Pendapatan Daerah.....	8
2.1.2. Peranan Pemerintah.....	12
2.1.3. Konsep Desentralisasi Fiskal.....	17



2.1.4	Kebutuhan Fiskal Daerah.....	19
2.1.5.	Fungsi Kebijakan Fiskal.....	20
2.2.	Penelitian Terdahulu.....	22

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

3.1.	Ruang Lingkup Penelitian.....	25
3.2.	Sumber Data.....	25
3.3.	Metode Analisis.....	25
3.3.1.	Derajat Desentralisasi Fiskal.....	26
3.3.2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	27
3.3.3.	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah.....	28
3.4.	Batasan Variabel Operasional.....	29

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

4.1.	Keadaan Penduduk Kota Palembang.....	31
4.2.	Keadaan Perekonomian Kota Palembang.....	32
4.2.1.	Tinjauan Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang.....	32
4.2.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang.....	34
4.2.3.	Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Palembang.....	36
4.3.	Deskripsi Variabel Penelitian.....	37
4.3.1.	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	37
4.3.2.	Perkembangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP).....	40
4.3.3.	Perkembangan Subsidi dan Bantuan Dana (SBD).....	41

4.3.4. Perkembangan Total Penerimaan Daerah (TPD).....	43
--------------------------------------------------------	----

**BAB V : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
PADA ERA OTONOMI DAERAH**

5.1. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang.....	46
5.2. Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palembang.....	52
5.3. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah Kota Palembang.....	55
5.3.1. Analisis Efisiensi.....	55
5.3.2. Analisis Efektivitas.....	56

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Kesimpulan.....	59
6.2. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 1996-2005.....	5
Tabel 2.1.	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	18
Tabel 3.1.	Kategori Derajat Desentralisasi Fiskal.....	27
Tabel 3.2.	Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah.....	28
Tabel 3.3.	Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah.....	29
Tabel 4.1.	Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Kota Palembang Tahun 2004-2005.....	31
Tabel 4.2.	PDRB Kota Palembang Tahun 2004-2005.....	33
Tabel 4.3.	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Palembang Menurut Lapangan Usaha Tahun 1995-2005 Atas Dasar Harga Konstan 2000.....	35
Tabel 4.4.	Pendapatan Regional Per Kapita Kota Palembang Tahun 1996-2005..	36
Tabel 4.5.	Perkembangan Komponen PAD Kota Palembang Tahun 1996-2005..	38
Tabel 4.6.	Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kota Palembang Tahun 1996-2005.....	40
Tabel 4.7.	Perkembangan Subsidi dan Bantuan Dana Kota Palembang Tahun 1993-2005.....	42
Tabel 4.8.	Perkembangan Total Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 1996-2005.....	43
Tabel 5.1.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak (BHPBP), Serta Subsidi Dan Bantuan Dana (SBD) Kota Palembang 1996 – 2005.....	47
Tabel 5.2.	Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang Tahun 1996-2005.....	50
Tabel 5.3.	Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun 1996-2005...	53
Tabel 5.4.	Nilai Efisiensi Pemungutan PAD Kota Palembang Tahun 1996-2005.....	56
Tabel 5.5.	Nilai Efektivitas Pemungutan PAD Kota Palembang Tahun 1996-2005.....	57

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Perkembangan PAD Kota Palembang Tahun 1996-2005.....	6
Grafik 4.1.	Perkembangan Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 1996-2005.....	44
Grafik 5.1.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 1996-2005.....	48
Grafik 5.2.	Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang Tahun 1996-2005.....	51
Grafik 5.3.	Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun 1996-2005.....	54

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan daerah Kota Palembang pada era pemberlakuan otonomi daerah dengan melihat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), serta Subsidi dan Bantuan Dana (SBD) sebagai penerimaan daerah, dari sumber-sumber penerimaan tersebut maka dapat dilihat sejauh mana perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palembang, selain itu juga diperlukan analisis efisiensi dan efektifitas keuangan daerah untuk melihat kinerja keuangan daerah Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Palembang, dan berbagai literatur. Kerangka pemikiran yang mendasari kajian terhadap kinerja keuangan daerah Kota Palembang ialah konsep Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, dan efisiensi dan efektivitas. Teknik analisis menggunakan pendekatan secara kualitatif yang bersifat deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang selama kurun waktu 1996-2005 sebesar 14 persen dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 21,62 persen yang berarti kapasitas fiskal, dan kemandirian masih rendah sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi, sedangkan indikator keuangan daerah menurut keefektifan pemungutan PAD sebesar 94,21persen dengan kriteria efektif dan efisiensi pemungutan PAD sebesar 4,25 persen dengan kriteria sangat efisien.



## ABSTRACT

This Research aim to measure and analyze the performance of area finance in Palembang City in the Era of Application Local Autonomy by seeing PAD, BHPBP, and SBD as a local income. From those source, we can see the degree of Fiscal Desentralization and the Independence of Locals income in Palembang city. Except that, it also needs Efficiency and Effectiveness analyze of locals income as a indicator of area finance performance in Palembang city. The data which is used in this research is the secondary data obtained from Badan Pusat Statistik (BPS) of Palembang city, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) of Palembang city, and some literatures. Opinion framework constitutoing study to performance of area finance in Palembang city is the Fiscal Desentralization Degree, the Independence of Locals Income, and the Efficiency and Effectiveness. Technique analyze used the approach qualitative having the character descriptive and quantitatively. Result of this research indicate that the degree of Fiscal Desentralization during 1996-2005 equal to 14 percent and the independence of local finance about 21,62 percent which is mean the Fiscal Capacity, and the independence of local finance still low, its mean the governmental depending of Palembang city to central government still high, The indicator of locals finance according to effectiveness of collection PAD about 94,21 percent, hence collection PAD has Effective and the Efficiency of collection PAD about 4,25 percent, hence expence collection PAD has very Efficient.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia telah dicanangkan per 1 Januari 2001 melalui satu paket undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 pada tanggal 15 Oktober 2004. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 serta Nomor 33 Tahun 2004 mengenai desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan kesempatan yang nyata bagi adanya perbaikan di dalam perubahan mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut mengindikasikan suatu pembaharuan dalam pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah menurut Kadjatmiko (2002) bertujuan untuk : pertama, menyelaraskan dengan kebijakan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainable*). Kedua, memperkecil ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*). Ketiga, mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*). Keempat, meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah. Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan keenam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik .

Pengembangan dan pelaksanaan sistem otonomi daerah di Indonesia telah mewujudkan struktur pemerintahan negara yang bersifat desentralisasi. Struktur

pemerintahan ini menuntut suatu sistem kinerja keuangan daerah di bawah pengawasan pusat yang dapat menjamin kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah, khususnya sebagai unit pelaksana ekonomi yang menyediakan barang-barang publik (Suparmoko, 2001:16).

Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam hal pengambilan keputusan dan pengelolaan fiskal kepada pemerintah daerah yang selanjutnya akan menjadi tanggung jawab kepada masyarakat daerah yang bersangkutan secara transparan (Boex, 2001 : 3).

Desentralisasi fiskal menurut Boex terdiri dari :

1. Penerimaan (Receipts), berhubungan dengan sumber-sumber penerimaan daerah termasuk pajak dan bukan pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah.
2. Pengeluaran (Expenditures), berhubungan dengan fungsi dan tanggung jawab atas segala pengeluaran untuk masing-masing tingkatan pemerintahan.
3. Pinjaman dan hutang (Loans), berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran sehingga menyebabkan terjadinya defisit daerah.
4. Transfer, berhubungan dengan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan desentralisasi tersebut didasarkan atas kebijakan fiskal dan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, serta mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasinya. Melalui desentralisasi fiskal diupayakan untuk mengurangi pola ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang selama era pra-reformasi telah terjadi sehingga daerah lebih mandiri dalam segala aspek. Pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi seluruh kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdiri

aspek penerimaan dan pengeluaran (Mangkoesoebroto, 2001 : 181). Adolf Wagner (1835-1817) dalam teori Hukum Semakin Meningkatnya Pengeluaran Negara (Sutrisna, 1998 : 364), mengemukakan bahwa semakin meningkatnya kegiatan pemerintah, maka pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut juga akan semakin meningkat, oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan pendapatan daerah sehingga mampu membiayai pengeluaran pemerintah dan dibutuhkan juga sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah pada saat ini, sedangkan pengelolaan keuangan daerah sendiri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan

Proses desentralisasi yang difasilitasi oleh Undang-Undang No 32 dan 33 Tahun 2004 telah menggeser paradigma yang ada kesuatu perubahan dimana setiap daerah diberikan hak, sekaligus kewenangan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan otonomi daerah dengan penyerahan 4 (empat) elemen dasar dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yaitu desentralisasi politik (*devolusi*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*), desentralisasi administrasi (*administration desentralization*), dan desentralisasi ekonomi (*economic desentralization*) yang akan menjadi kewajiban dari daerah untuk mengelolanya secara efektif dan efisien serta menumbuhkan kemandirian dan kemampuan daerah dalam melaksanakan fungsinya (Elmi , 2002 : 12), sehingga akan menuju pada bagaimanakah pemerintah dapat mengelola sumber-sumber potensi daerah yang ada agar kesejahteraan publik dapat tercapai sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Pengertian keuangan daerah menurut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD, sedangkan Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006), berdasarkan penjelasan diatas maka sangat diperlukannya peranan pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Palembang untuk mengupayakan pengoptimalan pendapatan daerah sebagai landasan yang kuat untuk menunjang keuangan daerah secara bertanggung jawab atas asas kesejahteraan publik.

Salah satu syarat yang diperlukan untuk pelaksanaan desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan lain-lain Pendapatan yang sah. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah; dana cadangan daerah; dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber diatas merupakan aliran utama dari pendapatan daerah, tetapi sejauh manakah pemanfaatan sumber dan potensi daerah tersebut terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menopang pelaksanaan desentralisasi daerah khususnya Kota Palembang agar efektif dan efisien.

Kota Palembang menjadi salah satu titik berat penyelenggaraan otonomi daerah di Propinsi Sumatera Selatan didasari oleh kemampuan Kota Palembang dalam memenuhi variabel utama yakni kemampuan keuangan daerah khususnya PAD, kemampuan aparatur dalam produktifitas kerja dan efisiensi, efektivitas tatalaksana, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu unsur yang cukup menentukan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk mengelola dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, karena kemampuan dan kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar potensi Pendapatan Asli Daerah dapat digali dan direalisasikan dan kontribusinya terhadap keuangan daerah.

**Tabel 1.1.**

**Pendapatan Asli Daerah kota Palembang  
1996 – 2005 (Dalam Rupiah)**

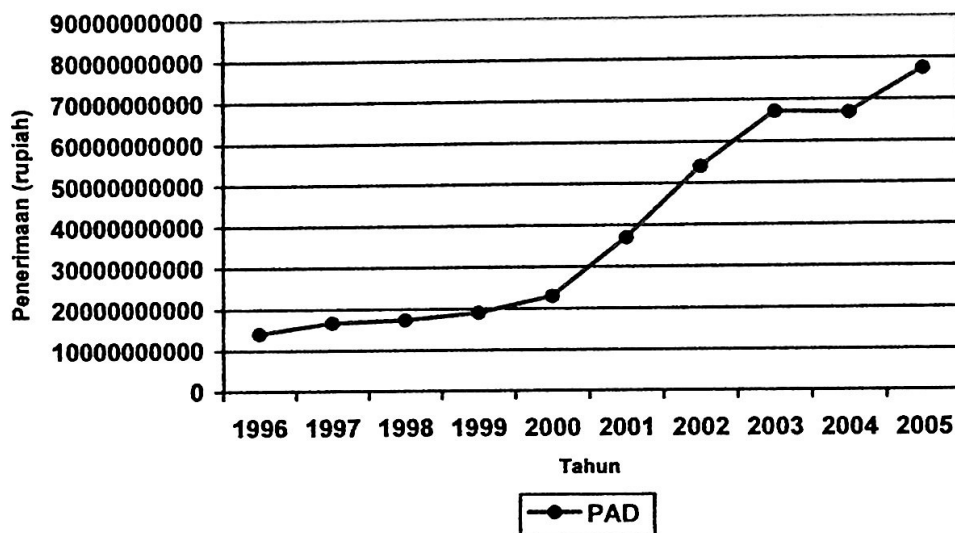
Tahun	PAD
1996	14.027.358.878
1997	16.598.610.577
1998	17.236.078.998
1999	18.943.515.577
2000	22.908.608.607
2001	36.959.416.529
2002	54.036.430.570
2003	67.151.817.006
2004	66.812.272.044
2005	77.416.857.337

Sumber : Palembang Dalam Angka Tahun 2004-2005, BPS Palembang

Grafik 1.1.

Perkembangan PAD Kota Palembang

Tahun 1996-2005



Selama kurang lebih enam tahun pelaksanaan otonomi daerah di Kota Palembang, sangat diperlukannya kajian mengenai kinerja keuangan daerah Kota Palembang pada era desentralisasi. Berdasarkan data diatas dapat dilihat peningkatan Pendapatan Asli daerah Kota Palembang pada era desentralisasi terutama pada era pemberlakuan otonomi daerah, perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan terus berfluktuasi pada tahun-tahun berikutnya, Sehingga dapat dikaji sejauh manakah efektivitas dan efisiensi dari pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah melalui kinerja keuangan daerah, derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah Kota Palembang, oleh karena itulah sangat diperlukan analisis mengenai kinerja keuangan daerah pada era otonomi daerah terutama di kota Palembang agar dapat dilihat sejauh manakah keberhasilan kota Palembang dalam menggali potensi Sumber Daya dan pemanfaatan dari Pendapatan Asli Daerah sebagai evaluasi dan koreksi dimasa depan agar kinerja keuangan daerah dapat lebih efektif dan efisien, dengan demikian

berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Palembang Pada Era Otonomi Daerah.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah : Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah Kota Palembang Pada Era Otonomi Daerah.

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini melihat kinerja keuangan daerah Kota Palembang pada era otonomi Daerah yang diukur melalui Efisiensi, Efektivitas, dan Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Praktis**

Menjadi input bagi penyusunan kebijakan mengenai keuangan daerah pemerintah kota Palembang dan sebagai perbandingan serta pemikiran untuk menentukan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

### **2. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian lebih lanjut dan sebagai masukan untuk penerapan ilmu ekonomi keuangan daerah.



## Daftar Pustaka

- Bamim, Selamat. 2002. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Propinsi Sumatera Selatan. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang
- Basri, Faisal. 1997. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*. Erlangga
- Boex, Jameson. 2001. *An Introduction Overview of Intergovernmental fiscal relation*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan. 2007. *Sumatera Selatan Dalam Angka 1996-2005*. Palembang: BPS
- Darwin, Jhon. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat-Daerah Kasus Propinsi Sumatera Selatan. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang
- Dinas pendapatan daerah. 2007. *Realisasi Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan 1996-2005*. Palembang: Dipenda
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Otonom di Indonesia*. Jakarta: Penerbit UIPress
- Hakim. 1989. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
- Herta. 2007. Analisis Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air di Propinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
- Hidayat, Dian. 2006. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palembang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
- Kadajmiko. 4-5 September 2002. Dinamika Sumber Keuangan Bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah. *Makalah Disampaikan dalam Matching National Policy Agenda with Local Fiscal Practices : International Workshop on Fiscal Desentralization*. Bandung
- Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001.
- Mahi, Raksaka. *Managing Local Revenue in Indonesia*. 2002.
- Mangkusubroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Edisi 3. Yogyakarta: PT. BPFE

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- PH. Sutrisna. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: Penerbit LPFE UGM
- Purohit, Mahesh, 2003. *Simple Tools for Evaluating Revenue Performance of Developing Country*. Diambil pada tanggal 6 Oktober 2007 dari [www.iog.ca/publication.html](http://www.iog.ca/publication.html)
- Shah, Anwar, 2003. *Ensuring Accountability When There is No Bottom Line*. Diambil pada tanggal 6 Oktober 2007 dari [www.iog.ca/publication.html](http://www.iog.ca/publication.html)
- Stiglitz, Joseph E. 2001. *Economic of Public Sector*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sukirno, Sadono. 1999. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
- Susetyo, Didik. Rabu 21 Juli 2004. *Simulasi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pemilu*. Makalah disampaikan dalam *Forum Diskusi Kebijakan Ekonomi, Fiskal, Moneter, dan Perbankan* diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan Bank Indonesia. Palembang
- Suparmoko. 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit andi
- Susilo. 2000. *Sebuah Resep Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendekatan ZOPP*. Lintas Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
- Republik Indonesia Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Republik Indonesia Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Republik Indonesia Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika